DAMPAK PENGEMBANGAN PARIWISATA ALAM TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR

Pariwisata alam merupakan perjalanan ke suatu objek wisata alam dengan objek wisata yang unik atau khas atas flora, fauna maupun jasa alam lainnya untuk dinikmati pengunjung seraya mereka melakukan kegiatan penelitian, pendidikan dan sebagainya. Artinya, pengunjung berwisata dengan tujuan khusus dan diharapkan kunjungan mereka membawa dampak positif secara ekonomi, sosial dan lingkungan secara simultan, tidak saja terhadap objek wisata alam, melainkan terhadap masyarakat sekitar objek wisata alam.

Buku ini menyajikan bagaimana dampak pengembangan suatu objek wisata alam terhadap masyarakat sekitarnya dan mudah-mudahan dapat menginspirasi para pihak mewujudkan sebuah kebijakan pengembangan wisata alam yang tepat sasaran dalam mengisi konsep pembangunan yang berkelanjutan. Jika masyarakat sekitar tidak merasakan manfaat sama sekali atas keberadaan wisata alam, sedikit mustahil penetapan sistem zonasi sebuah objek wisata alam akan terwujud secara utuh, bahkan akan berakibat selalu timbulnya konflik antara unit Pengelola di satu sisi dan masyarakat sekitar objek di sisi lain.

Dr. Muhammad Safri, SE., M.Si adalah dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, menamatkan pendidikan pada Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, S2 pada Ilmu Perencanaan Wilayah dan Pedesaan IPB dan S3 pada Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB. Pernah mengemban berbagai pelatihan singkat seperti Pelatihan tingkat Dasar Teknik Perencanaan Pembangunan Daerah di FE Unsyiah Kuala Banda Aceh dan tingkat intermediate di Amherst, Universitas Massachusetts di Amerika Serikat. Aktif mengajar di beberapa Perguruan Tinggi Swasta.

DAMPAK PENGEMBANGAN PARIWISATA ALAM TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR

MUHAMMAD SAFRI

MUHAMMAD SAFRI

DAMPAK PENGEMBANGAN PARIWISATA ALAM TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR

DAMPAK PENGEMBANGAN PARIWISATA ALAM TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR

MUHAMMAD SAFRI

pena persada

PENERBIT CV. PENA PERSADA

**DAMPAK PENGEMBANGAN PARIWISATA ALAM
TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR**

Penulis:

Muhammad Safri

ISBN : 978-623-93873-1-0

Design Cover :

Retnani Nur Brilliant

Layout :

Nisa Falahia

Penerbit CV. Pena Persada

Redaksi :

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas
Jawa Tengah

Email : penerbit.penapersada@gmail.com

Website : penapersada.com

Phone : (0281) 7771388

Anggota IKAPI

All right reserved

Cetakan pertama : 2020

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa ijin
penerbit

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas semua limpahan rahmat dan hidayah Allah SWT., buku **“Dampak Pengembangan Pariwisata Alam Terhadap Masyarakat Sekitar”** dapat diterbitkan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini, terutama penerbit Pena Persada yang telah berkenan melakukan kerjasama menerbitkan buku ini. Mudah-mudahan kehadiran buku ini dapat memberikan sumbangan positif terhadap sisi teoritis dunia pariwisata alam, implementasi kebijakan bagi pemerintah dan para pihak lainnya maupun masyarakat umum.

Penulisan buku dampak pengembangan pariwisata alam terhadap masyarakat sekitar lokasi objek pariwisata alam tidak lain diharapkan agar kegiatan pariwisata dimaksud dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat setempat, benar-benar dapat terwujud. Seandainya kegiatan pariwisata alam tersebut dinilai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar, maka mereka akan merasa memiliki serta secara otomatis ikut berpartisipasi menjaga kelestarian lingkungan alami.

Semua masukan yang sifatnya membangun akan diterima dengan senang hati dan kepada penerbit Pena Persada yang telah melakukan kerjasama dan bersedia menerbitkan buku ini, secara khusus disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi.

Jambi, Mei 2020

Muhammad Safri

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEM- BANGAN PARIWISATA-PARIWISATA ALAM.....	9
BAB III PARIWISATA ALAM DAPAT MENINGKATKAN KEMAJUAN CARA BERFIKIR MASYARAKAT	14
BAB IV EKONOMI LINGKUNGAN	16
BAB V PARIWISATA MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT	21
BAB VI DAMPAK PARIWISATA ALAM TAMAN DHARMA WANITA KOTA PEKANBARU	33
A. Sektor Pariwisata	34
B. Pariwisata dan Rekreasi	36
C. <i>Contingent Valuation Method</i> (CVM).....	37
D. Surplus Konsumen & Nilai Ekonomi	40
BAB VII PERANAN EKONOMI TRANSPORTASI	41
BAB VIII FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERTUMBUHAN DAERAH	47
A. Laju Pembangunan Ekonomi	48
B. Faktor-Faktor Penyebab Pertumbuhan Daerah	49
C. Ekonomi Kesejahteraan	50
BAB IX PENUTUP	56
DAFTAR PUSTAKA	59

BAB I

PENDAHULUAN

Peranan pariwisata dalam pembangunan negara secara makro meliputi tiga segi yakni segi ekonomis (sumber devisa, pajak-pajak), segi sosial (penciptaan lapangan kerja), dan segi kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan kepada para wisatawan). Ketiga segi tersebut tidak saja berlaku bagi wisatawan asing, tetapi juga untuk wisatawan-wisatawan domestik yang kian meningkat peranannya (Spillane, 1994).

Pembangunan pariwisata bahari merupakan salah satu sektor yang dapat diandalkan untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB). Tahun 2000 sektor pariwisata mampu memberikan kontribusi sebesar Rp. 128,31 triliun atau sebesar 9,38% dari total PDB Indonesia yang sebesar Rp. 1.368 triliun (Dimjati, 2003). Hal menarik yang patut dikemukakan adalah bahwa pencapaian sebesar itu diperoleh melalui peranan investasi kepariwisataan yang hanya mencapai 5,24% dari total investasi nasional. Sementara itu, peranan dalam penyediaan lapangan kerja mencapai 7,36 juta orang atau 8,11% dari total lapangan kerja nasional sebesar 89,8 juta.

Contoh Pariwisata yang memberikan dampak pada masyarakat sekitar yaitu Daerah Maluku. Maluku merupakan propinsi kepulauan dengan luas wilayah 712.480 km² terdiri dari sekitar 92,4% lautan dan 7,6% daratan dengan panjang garis pantai 11.000 km. Selain itu, perairan Maluku dilalui oleh tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) melewati pulau-pulau kecil yang tersebar hampir merata di seluruh wilayah Maluku (Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2005). Menurut catatan dalam Statistik, Propinsi Maluku yang tergambar didalam Produk Domestik Regional Bruto menunjukkan bahwa sejak tahun 2004-2008 sektor pariwisata terus mengalami peningkatan. Jumlah PDRB tahun 2007 berada pada posisi kedua setelah sektor

pertanian yaitu sebesar Rp. 922.453 juta per tahun. Jumlah ini terus meningkat yakni pada tahun 2008 yaitu sudah mencapai Rp. 971.534 juta per tahun (BPS, 2009).

Hal ini juga dapat dilihat pada tahun 2010 menjelang event Sail Banda di Maluku, terjadi peningkatan jumlah wisatawan sejak bulan Januari sampai dengan Juni adalah sebesar 25.695 orang yang terdiri dari wisatawan mancanegara 3.898 orang, wisatawan nusantara 10.864 orang dan wisatawan lokal 10.933 orang (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Maluku, 2010). Mencermati perkembangan jumlah wisatawan di Maluku melalui kegiatan Sail Banda, maka berpotensi meningkatkan kegiatan ekonomi lokal antara lain peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan peningkatan pendapatan asli daerah.

Salah satu kawasan wisata di Maluku yang memiliki potensi dan sering dikunjungi oleh para wisatawan adalah Pantai Natsepa. Pantai Natsepa terletak di kawasan Negeri Suli kabupaten Maluku Tengah. Kawasan wisata ini merupakan salah satu kawasan wisata yang memiliki potensi diantaranya lokasi yang luas, keindahan laut dan pasir putih serta rujak khas Natsepa yang sudah terkenal kelezatannya. Disamping itu, pantai ini memiliki berbagai fasilitas maupun sarana dan prasarana yang menunjang sebagai kawasan wisata.

Jumlah wisatawan yang berkunjung di objek ini tahun 2009 sebanyak 47.529 orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan pada tahun 2008 yaitu sebanyak 43.333 orang, (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Maluku Tengah, 2009). Pada tahun 2010 terus terjadi peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata Pantai Natsepa yaitu sebanyak 53.607 orang (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Maluku Tengah, 2010). Hal ini dapat dilihat sebagai dampak dari diadakannya kegiatan Sail Banda di Maluku.

Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Pantai Natsepa akan membuka kesempatan berusaha bagi masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatan dengan menyediakan berbagai macam kebutuhan wisatawan selama berada di Pantai Natsepa. Peluang

inilah yang dimanfaatkan oleh masyarakat dengan menawarkan berbagai jasa atau barang-barang yang dibutuhkan untuk menarik minat wisatawan yang berkunjung. Bertambahnya permintaan kebutuhan jasa dan barang yang dibutuhkan wisatawan, berdampak pada peningkatan pendapatan atau penghasilan masyarakat di kawasan wisata Pantai Natsepa.

Berdasarkan kondisi tersebut, masyarakat setempat perlu mengoptimalkan sumberdaya manusia untuk dapat ikut serta dalam kegiatan pariwisata bahari di wilayahnya guna meningkatkan pendapatan mereka, karena bagaimanapun kegiatan pariwisata tidak terlepas dari interaksi masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu kegiatan kepariwisataan pada kawasan wisata Pantai Natsepa sudah semestinya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi dalam bentuk pendapatan dan peningkatan tingkat kesejahteraan. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian tentang Dampak Pariwisata terhadap Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Pelaku Usaha di Kawasan Wisata Pantai Natsepa, Pulau Ambon, mengingat potensi usaha yang dimiliki oleh kawasan wisata ini mengandung nilai jual sehingga dari sisi ekonomi bisa diketahui kontribusinya terhadap masyarakat yang memanfaatkan kawasan wisata ini.

Kepariwisataan Indonesia adalah pariwisata yang berbasis alam dan budaya. Letak geografis Indonesia yang diapit 2 benua (Asia dan Australia) menjadi lokasi yang strategis bagi para wisatawan mancanegara untuk berlibur. Ditambah lagi rendahnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing tentu menambah daya tarik sektor pariwisata Indonesia. Dengan adanya potensi sektor pariwisata di Indonesia, hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional baik dalam bentuk devisa asing maupun perputaran uang di dalam negeri. Pariwisata juga bermanfaat dalam meningkatkan lapangan kerja, taraf hidup, dan pendapatan masyarakat (Famytyas, 2014).

Perkembangan kegiatan ekowisata di Indonesia lebih mengarah pada kawasan yang dilindungi (kawasan hutan konservasi) karena obyek daya tarik wisata alamnya yang lebih tinggi. Salah satu lokasi tujuan kegiatan ekowisata yaitu kawasan Taman Wisata Alam (TWA). Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi alam (Premono B. et al, 2008). Pengembangan pariwisata memiliki tiga fungsi yaitu menggalakan ekonomi, memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup, memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa (Joyosuharto, 1995 dalam Soebagyo, 2012).

Pariwisata merupakan sektor yang sangat kompleks karena pariwisata bersifat multidimensi, baik fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik. Selain itu kegiatan pariwisata sebagai kegiatan matarantai akan melibatkan berbagai sektor dan lembaga yang terkait. Berkembangnya sektor pariwisata di suatu negara akan menarik sektor lain untuk berkembang pula karena produk-produknya diperlukan untuk menunjang industri pariwisata, seperti sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kerajinan rakyat, peningkatan kesempatan kerja, dan lain sebagainya. Kecenderungan perkembangan dunia pariwisata mulai meninggalkan konsep pariwisata massal dan mengarah kepada konsep pariwisata lingkungan (ecotourism), dimana keaslian potensi kekayaan alam dan peran serta masyarakat setempat dibutuhkan. Indonesia yang merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan alam yang berlimpah ruah mempunyai peranan yang sangat penting bagi pengembangan kepariwisataan terutama wisata alam. Penilaian terhadap suatu kawasan wisata memiliki peranan yang dapat menentukan pengembangan dari tempat wisata itu sendiri yang mencakup berbagai faktor yang berkaitan dengan nilai sosial dan politik. Menurut Ward et.al, 2000 (dalam Rahardjo) metode penilaian khususnya untuk mengukur nilai ekonomi wisata alam yang paling banyak dipakai adalah Travel

Cost Method (TCM). Metode ini menduga nilai ekonomi kawasan wisata berdasarkan penilaian yang diberikan masing-masing individu atau masyarakat terhadap kenikmatan yang tidak ternilai (dalam rupiah) dari biaya yang dikeluarkan untuk berkunjung ke sebuah objek wisata, baik itu opportunity cost maupun biaya langsung yang dikeluarkan seperti biaya transportasi, konsumsi makanan, minuman, hotel, tiket masuk dan sebagainya.

Secara ekonomi pariwisata massal telah memberikan manfaat yang besar, akan tetapi aspek sosial dan lingkungan kurang diperhatikan. Selain itu, dampak positif dari aspek ekonomi pariwisata massal kurang dirasakan oleh masyarakat setempat. Menurut Sihite (2000), hal ini antara lain disebabkan pariwisata massal lebih banyak menggunakan fasilitas atau bahan impor sehingga dampak gandanya (*multiplier effect*) bagi masyarakat setempat sangat kecil. Penggunaan sarana pariwisata yang berasal dari modal asing (misalnya hotel), juga menyebabkan kurangnya kemandirian ekonomi masyarakat.

Dalam aspek sosial dan lingkungan, Soemarwoto (2001) menyatakan bahwa pariwisata massal telah menimbulkan berbagai permasalahan. Masyarakat setempat dalam pariwisata massal dapat terusir akibat konversi lahan pertanian untuk pembangunan prasarana pariwisata yang tidak terkendali. Rumah-rumah asli penduduk dan bangunan yang bernilai sejarah berkurang keasliannya karena terlalu menekankan aspek komersial. Pariwisata massal juga menyebabkan peningkatan tindak kejahatan atau munculnya perilaku yang bertentangan dengan norma adat setempat. Nilai-nilai asli kesenian maupun upacara tradisional akan berkurang keasliannya karena perubahan orientasi yang cenderung komersial.

Pariwisata merupakan komoditas yang dibutuhkan oleh setiap individu. Alasannya, karena aktivitas berwisata bagi seorang individu dapat meningkatkan daya kreatif, menghilangkan kejenuhan kerja, relaksasi, berbelanja, bisnis, mengetahui peninggalan sejarah dan budaya suatu etnik tertentu, kesehatan dan pariwisata spiritualisme. Meningkatkan waktu

luang sebagai akibat lebih singkatnya hari kerja dan didukung oleh meningkatnya penghasilan, maka aktivitas kepariwisataan akan semakin meningkat. Tempat rekreasi tidak memiliki nilai pasar yang pasti, maka penilaian tempat rekreasi dilakukan dengan pendekatan biaya perjalanan. Metode biaya perjalanan ini dilakukan dengan menggunakan informasi tentang jumlah uang yang dikeluarkan dan waktu yang digunakan untuk mencapai tempat rekreasi untuk mengestimasi besarnya nilai benefit dari upaya perubahan kualitas lingkungan dari tempat rekreasi yang dikunjungi (Yakkin, 1997 dalam Igunawati, 2010).

Pembangunan, termasuk pembangunan pariwisata yang terlalu berorientasi pada manfaat ekonomi mengurangi jumlah dan mutu sumberdaya hutan. Menurut Bank Dunia (2001) dan Alikodra (1998), laju penggundulan hutan di Indonesia periode 1985 sampai 1987 sebesar 16.5% atau 1 641 708 ha per tahun. Fenomena ini salah satu contoh tidak diperhitungkannya daya dukung alam. Kunjungan wisatawan yang terlalu besar dan tidak terkendali ke sebuah kawasan jelas akan mempengaruhi lingkungan setempat. Habitat satwa akan terganggu oleh keriuhan suara pengunjung, atau oleh suara kendaraan, dan sampah-sampah cenderung dibuang di sembarang tempat. Tindakan yang tidak terpuji lainnya berupa penebangan hutan/kayu untuk bahan bangunan sarana pariwisata, penggunaan tanah dan air/sungai yang kurang memperhatikan kelestarian. Terdapat corat coret fasilitas penunjang pariwisata, atau tanda-tanda reklame yang mengurangi keindahan alami.

Untuk meminimalisir dampak negatif pariwisata massal, dewasa ini berkembang pariwisata alam atau lebih dikenal dengan ekoturisme (*ecotourism*). Pariwisata ini dianggap sebagai salah satu pendekatan wisata yang bertanggung jawab, wisata yang berorientasi konservasi, dan wisata yang berkelanjutan. Wisatawan memilih melakukan perjalanan ke kawasan alami untuk berpetualang, mengagumi dan menikmati keindahan alami. Menurut Kodhyat (1998), keuntungan ekoturisme antara lain, 1) memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat, 2) tidak

bertentangan dengan adat istiadat setempat, dan 3) keberlanjutannya lebih terjamin. Ziffer & Young (1989) menambahkan bahwa keuntungan ekoturisme adalah: 1) meningkatkan perolehan dana konservasi, 2) meningkatkan pembangunan ekonomi, dan 3) menghindari pengrusakan sumberdaya alam.

Nilai ekonomi secara umum didefinisikan sebagai pengukuran jumlah maksimum seseorang ingin mengorbankan barang dan jasa untuk memperoleh barang dan jasa lainnya. Konsep ini disebut sebagai keinginan membayar (*willingness to pay*) seseorang terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan (Fauzi, 2010). Kerusakan sumber daya alam pada Obyek Wisata Ndayu Park maka akan sangat berpengaruh pada kemauan wisatawan untuk membayar (*willingness to pay*) pada Obyek Wisata Ndayu Park. Metode *willingness to pay* merupakan pengukuran menggunakan Metode Valuasi Kontingen (*Contingent Valuation Method/ CVM*).

Pariwisata merupakan salah satu sumber devisa negara selain dari sektor migas yang sangat potensial dan mempunyai andil besar dalam membangun perekonomian. Pemerintah sangat berharap bahwa sektor pariwisata akan mampu menjadi pengganti pemasok devisa utama setelah peran migas yang mengalami degradasi. Sebagai sektor strategis nasional, pariwisata juga mempunyai efek pengganda yang ditimbulkan dari aktivitas pariwisata baik bersifat langsung berupa penyerapan tenaga kerja disektor pariwisata maupun dampak tidak langsung berupa berkembangnya kegiatan ekonomi pendukung pariwisata seperti penginapan, rumah makan, jasa transportasi dan lain-lain.

Industri pariwisata dalam tahun 1997 secara global menghasilkan US \$ 3.8 triliun Hasil Bruto (*Gross Output*) dan 262 juta pekerjaan diseluruh dunia.diperkirakan perolehan tersebut dalam tahun 2007 akan tumbuh menjadi US\$ 7.1 triliun Hasil Bruto dan 383 juta pekerjaan (Yoeti 1999). Lebih lanjut, Yoeti (1999) menyatakan bahwa untuk Indonesia pada tahun 1997 diperoleh Hasil Bruto sebesar Rp 64.480 milyar dan 6.6 juta pekerjaan dan

untuk tahun 2007 diperkirakan akan meningkat menjadi Rp 248.363 milyar Hasil Bruto serta 8.5 juta pekerjaan. Uraian tersebut menunjukkan bahwa pariwisata massal memberikan sumbangan yang signifikan dalam ekonomi.

BAB II

KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA-PARIWISATA ALAM

Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan daerah kabupaten dan kota tidak termasuk konservasi. Kewenangan propinsi dalam pasal 2 meliputi kebijaksanaan pendayagunaan sumberdaya alam serta konservasi, yang khusus berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan dan konservasi alam, antara lain penyelenggaraan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, penyelenggaraan izin usaha pemanfaatan pengusahaan pariwisata alam lintas propinsi.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah juga menjadi salah satu acuan dalam pengembangan pariwisata alam. Dalam pasal 6 ayat 5 disebutkan bahwa penerimaan negara dari sektor kehutanan (apabila kawasan konservasi dimasukkan dalam sektor kehutanan) dibagi dengan imbalan 80% untuk daerah dan 20% untuk pemerintah pusat.

Dalam Undang-undang Otonomi jangan sampai kekuatiran sebagian kalangan bahwa di era otonomi kerusakan sumberdaya hutan semakin menjadi-jadi, dan masalah kehutanan yang berada di pusat pindah ke daerah. Target peningkatan pendapatan asli oleh daerah jangan sampai menjadikan pengelolaan sumberdaya alam seperti hutan dan sumberdaya alam lainnya menjadi terkuras. Sumberdaya alam hutan dapat saja dimanfaatkan, namun harus serasi dengan penggalian manfaat sosial dan lingkungan. Sebab, setiap pemanfaatan sumberdaya hutan yang terlalu mengeksploitasi sisi keuntungan ekonomi saja akan menimbulkan dampak negatif yang secara akumulatif berakibat tingginya "*cost*" yang bakal diterima masyarakat. Pengalaman masa lampau yang telah menimbulkan berbagai kerusakan

sumberdaya alam dan lingkungan harus dihindari. Target dan upaya mencari dan memenuhi daya pembangunan daerah jangan mengorbankan kelestarian lingkungan.

Untuk mencegah kerusakan dan melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan, pemerintah daerah dalam hal ini harus memperhatikan berbagai faktor penentu yang berperan. Pertama, kemampuan sumberdaya manusia dan organisasi; kedua, perangkat aturan pelaksanaan termasuk norma dan batasan-batasannya; ketiga, kemampuan untuk melaksanakan segala peraturan (Alikodra 2000). Faktor-faktor penentu ini harus segera dipersiapkan untuk segera dapat menjalankan mandat otonomi secara profesional. Penyiapan faktor-faktor penentu memang membutuhkan konsentrasi dan biaya yang cukup mahal, namun jika diabaikan, maka sangat sulit bagi daerah untuk keluar dari akar permasalahan guna mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Diperlukan kebulatan tekad daerah bersama berbagai *stakeholders* untuk memobilisir seluruh kemampuan yang dimiliki dan menetapkan visi dan misi pembangunan daerah. Selanjutnya menjadi kewajiban kepala daerah menggerakkan seluruh *stakeholders* untuk mewujudkan visi dan misi daerahnya melalui kebijakan, strategi dan program- programnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Peran DPRD sebagai wakil rakyat menjadi sangat penting dalam mencapai target pembangun daerah yang berwawasan lingkungan. Koordinasi dengan propinsi dan pemerintah pusat akan tetap diperlukan disamping untuk meningkatkan kemampuan institusi daerah dalam mengatasi permasalahan yang sifatnya lintas batas kabupaten/kota, juga untuk meningkatkan kemungkinan kerjasama dengan berbagai negara ataupun berbagai lembaga internasional.

Pengelolaan sumberdaya alam tidak terlepas para pengambil keputusan dibidang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Merekalah yang berperan untuk merubah kondisi sumberdaya alam dan lingkungan, apakah menjadi semakin rusak atau menjadi semakin baik. Oleh karena itu, sangat perlu untuk

mengubah sikap dan perilaku mereka pada tingkat manapun agar tetap dalam koridor pembangunan daerah berwawasan lingkungan.

Menurut Suparmoko dan Suparmoko (2000), penetapan nilai penggunaan barang publik yang tidak memiliki pasar (*non existence of the market*) dilakukan dengan beberapa pendekatan: a) pendekatan pendapatan; b) pendekatan kesejahteraan; c) penghitungan fisik dan d) penghitungan moneter. Dalam pendekatan pendapatan yang dipentingkan adalah perubahan yang terjadi pada sumberdaya alam, namun tidak perlu melihat berapa banyak persediaan sumber daya alam yang ada. Akan tetapi pendekatan ini tidak melihat hubungan antara kesejahteraan dengan volume sumberdaya alam yang diambil sehingga dikuatirkan sumberdaya alam diambil terus menerus.

Melalui pendekatan kesejahteraan ingin diketahui berapa sesungguhnya volume persediaan sumberdaya alam yang ada di suatu tempat. Semakin banyak persediaan sumberdaya alam, makin sejahtera wilayah bersangkutan, sumberdaya tersebut dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang. Pendekatan ini bagi pemerintah atau pengelola sumberdaya alam untuk menyesuaikan tingkat pengambilan sumberdaya alam sehingga terjadi keseimbangan antara sumberdaya alam yang ada dengan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi penghitungan persediaan sumberdaya alam relatif sulit.

Perhitungan secara fisik dapat membantu dilakukannya perencanaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Oleh karena sumberdaya alam merupakan faktor produksi bersama dengan faktor produksi lainnya dan masing-masing memiliki harga, akan menjadi lebih sempurna jika dilakukan nilai (*valuation*) terhadap sumberdaya sehingga dapat dijadikan prasyarat pembuatan neraca moneter sumberdaya alam.

Maksud penghitungan moneter adalah untuk disatukannya nilai penyusutan sumberdaya dan degradasi lingkungan ke dalam nilai Produk

Semakin merosotnya sumberdaya alam dalam era otonomi khususnya berkaitan dengan sifat atau ciri yang melekat pada lingkungan alami itu sendiri, sehingga manusia berusaha mengeksploitasinya. Ciri atau sifat yang melekat pada sumberdaya alami itu terdiri: sifat/cirinya sebagai barang publik, sifat/cirinya sebagai barang milik bersama (*common proverty*) serta adanya eksternalitas. Eksternalitas muncul apabila kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam menimbulkan dampak pada orang lain, baik dalam bentuk manfaat maupun biaya eksternal yang semuanya tidak memerlukan kewajiban untuk menerima atau melakukan pembayaran. Oleh karena eksternalitas tidak diperhitungkan, maka manfaat eksternal akan dapat menjadi terlalu kecil dan biaya eksternal akan menjadi terlalu besar, lebih-lebih bila berbentuk biaya yang ditanggung oleh masyarakat.

Prinsip-prinsip lama pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan harus segera ditinggalkan karena sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan pembangunan yang menghendaki perubahan-perubahan ke arah perbaikan untuk menjamin tercapainya pembangunan daerah secara berkelanjutan. Prinsip-prinsip yang perlu dirombak adalah: bekerja pada kondisi keterbatasan data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan; pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang dicirikan dengan praktek-praktek monopolistik dan sentralistik; mengutamakan kepentingan ekonomi ketimbang kepentingan ekologi; pendekatan pembangunan yang bertumpu pada batas-batas administratif dengan mengabaikan batasan/unit ekologi; pembangunan yang kurang terkoordinasi dan tidak terintegritas dengan tujuan pengelolaan lingkungan hidup; kurang diperhatikannya fungsi-fungsi ekologi yang mendukung pembangunan, misalnya fungsi hutan mangrove, fungsi daerah resapan, fungsi terumbu karang, fungsi daerah rawa, fungsi lahan gambut, dsb.

Dalam pasal 31 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya di kawasan pelestarian alam (seperti Taman nasional, Tahura)

dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan untuk budaya dan wisata alam tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan.

Sedangkan kebijaksanaan pemerintah dalam pengembangan pariwisata-pariwisata alam di “kawasan konservasi” dalam kaitan dengan otonomi daerah mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dalam pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa kewenangan bidang lain, termasuk konservasi tidak termasuk dalam kewenangan daerah. Daerah dalam undang-undang ini berwenang mengelola sumberdaya nasional yang terdapat di wilayahnya dan bertanggungjawab memelihara lingkungannya.

BAB III

PARIWISATA ALAM DAPAT MENINGKATKAN KEMAJUAN CARA BERPIKIR MASYARAKAT

Secara politik, pariwisata alam yang berlangsung dengan baik akan dapat meningkatkan hubungan perdamaian antar bangsa. Kunjungan wisata akan dapat membangun saling pengertian pada perbaikan tatanan hubungan antar bangsa, oleh karena adanya saling pengertian dan penghargaan antar personal yang menjelma menjadi hubungan antar bangsa.

Secara ekonomi pariwisata alam akan mendatangkan peningkatan pendapatan devisa negara dan pendapatan daerah, serta menciptakan kesempatan kerja/ berusaha bagi masyarakat sekitar lokasi pariwisata alam. Kegiatan pariwisata alam secara umum akan dapat mempengaruhi permintaan, penawaran, neraca pembayaran, ketenagakerjaan, pengeluaran, pembangunan dan lain sebagainya. Dengan kata lain, pariwisata alam akan dapat membantu dan menunjang gerak pembangunan, baik oleh karena penyediaan prasarana maupun penyediaan sarana pariwisata. Menurut Joppe (1996), perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah masyarakat setempat memang menerima suatu manfaat atau tidak karena adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

Objek wisata alam yang unik dan khas akan menarik minat wisatawan untuk datang melakukan kunjungan wisata. Mereka dapat menikmati keindahan alam dan memperoleh pengalaman asli alami. Oleh karena wisatawan yang lazim disebut ekoturis melakukan perjalanan ke kawasan alam dengan penuh tanggungjawab terhadap lingkungan, maka pariwisata alam akan dapat menunjang upaya konservasi. Dalam implementasinya, pariwisata alam diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan konservasi dengan lingkungan yang dikembangkan dalam

hubungan saling sinergi antara alam, penduduk dan wisatawan (Ross & Wall 1999). Wisatawan kategori ini tidak saja terbatas melakukan kegiatan pengamatan, melainkan ada yang melakukan penelitian. Artinya, pariwisata alam akan dapat mengembangkan penelitian, pendidikan dan latihan di objek pariwisata setempat. Dana yang diperoleh dari kegiatan pariwisata alam dapat dikembalikan untuk tujuan pengelolaan konservasi lingkungan fisik. Menurut Bjork (2000) peningkatan pengetahuan akan lingkungan yang disebabkan adanya hal yang unik dan khas di alam akan dapat menciptakan kesadaran hubungan timbal antara lingkungan yang bagus dengan ekonomi yang bagus.

Kegiatan pariwisata alam akan dapat menimbulkan proses akulturasi budaya terhadap kebudayaan itu sendiri serta interaksi yang terjadi antara kebudayaan-kebudayaan. Kebudayaan setempat akan semakin tumbuh dan berkembang karena semakin banyaknya wisatawan yang datang untuk mengetahui dan melihat kebudayaan asli tersebut. Bahkan akan dapat terjadi penggalian nilai-nilai budaya asli oleh masyarakat itu sendiri.

Pariwisata alam dapat menimbulkan gairah untuk meningkatkan serta mendorong kehidupan sosial dan budaya masyarakat, meningkatkan partisipasi serta menimbulkan sikap keterbukaan tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur. Oleh Goodwin dan Roe (2001), dikemukakan bahwa pariwisata alam di sebuah taman nasional harus dapat merespon aspirasi dan memenuhi harapan untuk menjamin kehidupan masyarakat lokal sekitarnya berupa kesempatan kerja dan berusaha. Dan pada sisi lain, pariwisata alam akan dapat mendorong tetap terpeliharanya monumen-monumen kebudayaan, tempat bersejarah, seni tradisional, upacara dan pakaian adat.

Dari sisi sosial, pariwisata alam ikut berperan secara nyata menyadarkan masyarakat akan perlunya saling pertemuan yang dapat menimbulkan saling pengertian dalam segala aspek kehidupan yang pada akhirnya dapat memperluas ruang lingkup hubungannya dengan manusia lain. Pariwisata alam dapat meningkatkan kemajuan cara berpikir masyarakat.